REPUBLIK INDONESIA

PERSETUJUAN

ANTARA

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

DAN

PEMERINTAH REPUBLIK PANAMA

TENTANG

PEMBEBASAN VISA BAGI PEMEGANG PASPOR DIPLOMATIK, DINAS, KONSULER DAN KHUSUS

Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Panama, yang selanjutnya secara individual disebut sebagai "Pihak" dan bersama-sama sebagai "Para Pihak";

MENIMBANG hubungan persahabatan yang terjalin antara kedua negara;

BERKEINGINAN untuk menyederhanakan prosedur terkait kunjungan warga Negara dari kedua negara, pemegang paspor diplomatik, dinas, konsuler dan khusus ke Republik Indonesia dan Republik Panama;

SESUAI dengan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di masing-masing negara;

TELAH MENYETUJUI sebagai berikut:

PASAL 1
PEMBEBASAN VISA

1. Warga Negara Indonesia, pemegang paspor diplomatik atau paspor dinas yang sah dan masih berlaku, dibebaskan dari keharusan memperoleh visa untuk masuk, transit atau tinggal dalam wilayah Negara Republik Panama dalam jangka waktu yang tidak melebihi 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal masuk.

2. Warga Negara Panama, pemegang paspor diplomatik, dinas, konsuler atau khusus yang sah dan masih berlaku, dibebaskan dari keharusan memperoleh visa untuk masuk, transit atau tinggal dalam wilayah Negara Republik Indonesia dalam jangka waktu yang tidak melebihi 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal masuk.

PASAL 2
MASA BERLAKU PASPOR

Masa berlaku paspor dari warga negara masing-masing Pihak sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sebelum memasuki wilayah Pihak yang lain.

PASAL 3
TEMPAT PEMERIKSAAN IMIGRASI

Warga negara salah satu Pihak pemegang paspor diplomatik, dinas, konsuler dan khusus, wajib masuk ke dalam wilayah Pihak lainnya melalui Tempat Pemeriksaan Imigrasi yang dibuka untuk lalu lintas penumpang internasional.

PASAL 4
VISA BAGI ANGGOTA MISI DIPLOMATIK DAN KONSULER

1. Warga negara dari salah satu Pihak yang merupakan pemegang paspor diplomatik, dinas, konsuler dan khusus yang ditugaskan sebagai anggota misi diplomatik atau konsuler di wilayah Pihak lainnya, termasuk anggota keluarga mereka, wajib memperoleh visa yang sesuai dari Kedutaan Besar Pihak penerima sebelum memasuki wilayah Pihak penerima.

2. Selama masa penugasan mereka, orang-orang tersebut di atas yang merupakan pemegang Izin Tinggal Diplomatik/Izin Tinggal Dinas dan Kartu Identitas yang diterbitkan oleh Pihak penerima dapat pergi, tinggal dan masuk kembali ke dalam wilayah Pihak penerima tanpa visa, selama Izin Tinggal Diplomatik/Izin Tinggal Dinas dan Kartu Identitas mereka masih berlaku dan ditunjukkan pada Tempat Pemeriksaan Imigrasi bersama dengan paspor diplomatik, dinas, konsuler atau khusus yang sah dan masih berlaku.

PASAL 5
PEMBATASAN VISA

Pemegang paspor yang sah dan masih berlaku dari salah satu Pihak sebagaimana dimaksud dalam Persetujuan ini dapat masuk dan keluar dari wilayah Pihak lainnya melalui titik yang diijinkan untuk tujuan tersebut oleh pihak imigrasi yang berwenang, tanpa pembatasan apapun kecuali yang telah ditentukan dalam syarat-syarat keamanan, imigrasi, bea cukai, kesehatan, dan lainnya yang secara hukum dapat diterapkan kepada pemegang paspor diplomatik, dinas, konsuler dan khusus.

PASAL 6
HAK PENOLAKAN

Salah satu Pihak berhak untuk menolak memberikan izin masuk atau memperpendek masa tinggal setiap orang yang diberikan pembebasan visa dan fasilitas lain berdasarkan Persetujuan ini apabila dianggap bahwa orang tersebut tidak dikehendaki.

PASAL 7
SPESIMEN PASPOR

Para Pihak wajib saling bertukar, melalui saluran diplomatik, spesimen paspor yang digunakan oleh masing-masing Pihak dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sebelum mulai berlakunya persetujuan ini maupun spesimen paspor yang baru sebelum mulai diterbitkan.

PASAL 8
PENUNDAAN

1. Masing-masing Pihak dapat, sewaktu-waktu, menunda untuk sementara waktu, secara keseluruhan atau sebagian, pelaksanaan dari Persetujuan ini, dengan alasan keamanan nasional, ketertiban umum atau kesehatan masyarakat.

2. Mulai berlaku maupun berakhirnya tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dari Pasal ini harus diberitahukan kepada Pihak lainnya selambat-lambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sebelum mulai diberlakukan melalui saluran diplomatik.

PASAL 9
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Setiap perselisihan di antara Para Pihak yang timbul dari penafsiran atau pelaksanaan dari Persetujuan ini akan diselesaikan secara damai melalui konsultasi atau perundingan oleh Para Pihak.

PASAL 10
AMANDEMEN

Salah satu Pihak dapat mengajukan secara tertulis sebuah amandemen secara keseluruhan atau sebagian dari Persetujuan ini. Pelaksanaan dari amandemen akan dituangkan dalam kesepakatan bersama antara Para Pihak, dan akan mulai berlaku sesuai dengan ketentuan dalam pasal 11 dari Persetujuan ini.

PASAL 11
MULAI BERLAKU, JANGKA WAKTU, DAN PENGAKHIRAN

1. Persetujuan ini wajib mulai berlaku 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal penerimaan pemberitahuan terakhir secara tertulis dimana Para Pihak saling memberitahukan Pihak lainnya, melalui saluran diplomatik, bahwa semua persyaratan internal untuk mulai berlakunya Persetujuan ini, sebagaimana diatur dalam masing-masing peraturan perundang-undangan nasionalnya telah dipenuhi.

2. Persetujuan ini wajib berlaku untuk jangka waktu yang tidak ditentukan, kecuali masing-masing Pihak memutuskan untuk mengakhiri Persetujuan ini dengan memberikan pemberitahuan secara tertulis kepada Pihak lainnya melalui saluran diplomatik 90 (sembilan puluh) hari sebelum tanggal pengakhiran yang ditentukan.

SEBAGAI BUKTI, yang bertanda tangan di bawah ini, yang diberi kuasa penuh oleh Pemerintahnya masing-masing, telah menandatangani Persetujuan ini.

DIBUAT di Panama City, pada tanggal 5 (lima) bulan Juni, tahun 2015 (dua ribu lima belas), dalam rangkap dua, masing-masing dalam Bahasa Indonesia, Bahasa Spanyol, dan Bahasa Inggris, semua naskah memiliki kekuatan hukum

yang sama. Dalam hal terjadi perbedaan penafsiran, naskah Bahasa Inggris wajib berlaku.

UNTUK PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

DIAN TRIANSYAH DJANI

Direktur Jenderal Amerika dan Eropa

UNTUK PEMERINTAH REPUBLIK PANAMA

LUIS MIGUEL HINCAPIÉ

Wakil Menteri Urusan Hubungan Luar Negeri

REPUBLIK INDONESIA

ACUERDO ENTRE

EL GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE INDONESIA

Y

EL GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE PANAMÁ

SOBRE

LA EXENCIÓN DE VISADO PARA TITULARES DE PASAPORTES DIPLOMÁTICOS, OFICIALES, DE SERVICIO, CONSULARES Y ESPECIALES

El Gobierno de la República de Indonesia y el Gobierno de la República de Panamá, en adelante denominados individualmente como la "Parte" y colectivamente como las "Partes";

RECONOCIENDO las relaciones amistosas existentes entre los dos países;

DESEANDO simplificar los procedimientos relacionados con las visitas de nacionales de ambos países, titulares de pasaportes diplomáticos, oficiales, de servicio, consulares y especiales de la República de Indonesia y de la República de Panamá;

CONFORME a las leyes y reglamentos vigentes en los respectivos países;

HAN ACORDADO lo siguiente:

ARTÍCULO 1
EXENCIÓN DE VISADO

1. Los nacionales de la República de Indonesia, titulares de pasaportes diplomáticos o servicio válidos no requerirán obtener visa para entrar, transitar o permanecer en el territorio de la República de Panamá por un período que no exceda de treinta (30) días a partir de la fecha de entrada.

2. Los nacionales de la República de Panamá, titulares de pasaportes diplomáticos, oficiales, consulares o especiales válidos, no requerirán

obtener visa para entrar, transitar o permanecer en el territorio de la República de Indonesia por un período que no exceda de treinta (30) días a partir de la fecha de entrada.

ARTÍCULO 2
DURACIÓN DE LA VALIDEZ DEL PASAPORTE

La duración de la validez del pasaporte de los nacionales de cualquiera de las Partes será como mínimo de seis (6) meses antes de entrar en el territorio de la otra Parte.

ARTÍCULO 3
MOSTRAR PUNTOS DE ENTRADA

El nacional de una Parte portador de un pasaporte diplomático, oficial, de servicio, consular o especial, entrará en el territorio de la otra Parte a través de los puntos de control abiertos para el tráfico internacional de pasajeros.

ARTÍCULO 4
VISA PARA MIEMBROS DE MISIONES DIPLOMÁTICAS Y CONSULARES

1. Los nacionales de cualquiera de las Partes que sean titulares de pasaportes diplomáticos, oficiales, de servicio, consulares y especiales válidos, asignados como miembros de la misión diplomática o consular en el territorio de la otra Parte, incluidos los miembros de su familia, tendrán la obligación de obtener visado para la entrada apropiada por la Embajada de la otra Parte antes de su entrada.

2. Durante el período de su asignación, las mencionadas personas que sean titulares de un permiso de estadía y la tarjeta de identificación emitida por la Parte receptora pueden salir, permanecer y volver a entrar en el territorio de la otra Parte, sin visa, siempre y cuando su permiso de estadía y de tarjetas de identificación sigan siendo válidas al presentarlas en la entrada junto con un pasaporte diplomático, oficial, de servicio, consular o especial válido.

ARTÍCULO 5
RESTRICCIÓN DE VISA

Los titulares de pasaporte válido de cualquiera de las Partes a los que se

refiere el presente Acuerdo podrán entrar y salir del territorio de la otra Parte por cualquier punto autorizado a tal efecto por las autoridades de inmigración competentes, sin ninguna restricción salvo las estipuladas en seguridad, migratorias, costumbre, sanitarias, y otras normas que pueden ser legalmente aplicable a los titulares de pasaportes diplomáticos, oficiales, de servicio, consulares o especiales.

ARTÍCULO 6
RECHAZO DE DERECHO

Cualquiera de las Partes se reserva el derecho a rechazar la admisión de entrada o acortar la duración de la estancia de cualquier persona con derecho a exención de visado y las instalaciones en virtud del presente Acuerdo si se considera que la persona es indeseable.

ARTÍCULO 7
MODELO DE PASAPORTE

Las Partes intercambiarán, a través de los canales diplomáticos, ejemplares de sus pasaportes utilizados por cada Parte treinta (30) días antes de la entrada en vigor del presente Acuerdo, así como especímenes de cualquiera de los nuevos pasaportes antes de su introducción.

ARTÍCULO 8
SUSPENSIÓN

1. Cada Parte podrá, en cualquier momento, suspender temporalmente la totalidad o parte de este Acuerdo por razones de seguridad nacional, el orden público o la salud pública.

2. La introducción y el cese de las medidas indicadas en el párrafo 1 del presente Artículo deberá ser informado debidamente a la otra Parte con treinta (30) días de antelación, a través de los canales diplomáticos.

ARTÍCULO 9
SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS

Cualquier controversia entre las Partes sobre la interpretación o aplicación del presente Acuerdo se resolverá amistosamente mediante consultas o negociaciones entre las Partes.

ARTÍCULO 10
ENMIENDA

Cualquiera de las Partes podrá solicitar por escrito una modificación de todo o parte de este Acuerdo. La aprobación de la enmienda se hará de común acuerdo entre las Partes y entrará en vigor según lo indicado en el Artículo 11 del presente Acuerdo.

ARTÍCULO 11
ENTRADA EN VIGOR, DURACIÓN Y TERMINACIÓN

1. El presente Acuerdo entrará en vigor treinta (30) días a partir de la fecha de recepción de la última notificación escrita en la que las Partes se comuniquen por la vía diplomática, que todos los requisitos para la entrada en vigor del presente Acuerdo, tal como se estipula en sus respectivas legislaciones nacionales, se han cumplido.

2. El presente Acuerdo permanecerá en vigor por un período de tiempo indefinido, a menos que cualquiera de las Partes decida dar por terminado el presente Acuerdo mediante notificación escrita a la otra Parte por la vía diplomática con noventa (90) días de anticipación a la fecha de terminación previsto.

EN FE DE LO CUAL, los abajo firmantes suscriben el presente Acuerdo debidamente autorizados por sus respectivos Gobiernos.

Hecho en la ciudad de Panamá, a los cinco (5) días del mes de junio del año dos mil quince (2015), en dos originales, en los idiomas indonesio, español e inglés siendo los textos igualmente auténticos. En caso de divergencia en la interpretación, el texto en inglés prevalecerá.

POR EL GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE INDONESIA

DIAN TRIANSYAH DJANI

Director General para América y Europa

POR EL GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE PANAMÁ

LUIS MIGUEL HINCAPIÉ

Viceministro de Relaciones Exteriores

REPUBLIK INDONESIA

AGREEMENT

BETWEEN

THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA

AND

THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF PANAMA

ON VISA EXEMPTION

FOR HOLDERS OF DIPLOMATIC, OFFICIAL, SERVICE, CONSULAR

AND SPECIAL PASSPORTS

The Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Republic of Panama, hereinafter referred to individually as a "Party" and collectively as the "Parties";

RECOGNIZING the existing friendly relations between the two countries;

DESIRING to simplify procedures related to visits of nationals of both countries, holders of diplomatic, official, service, consular and special passports, to the Republic of Indonesia and the Republic of Panama;

PURSUANT to the prevailing laws and regulations of the respective countries;

HAVE AGREED as follows:

ARTICLE 1
VISA EXEMPTION

1. Nationals of the Republic of Indonesia, holders of valid diplomatic or service passports shall not be required to obtain visa to enter, transit through, or stay in the territory of the Republic of Panama for a period which does not exceed thirty (30) days from the date of entry.

2. Nationals of the Republic of Panama, holders of valid diplomatic, official, consular or special passports shall not be required to obtain visa to enter, transit through, or stay in the territory of the Republic of Indonesia for a period which does not exceed thirty (30) days from the date of entry.

ARTICLE 2
DURATION OF PASSPORT VALIDITY

The duration of passport validity of nationals of either Party shall be at least six (6) months before entering the territory of the other Party.

ARTICLE 3
CHECK-POINTS ENTRY

The nationals of the Party holding diplomatic, official, service, consular and special passports, shall enter the territory of the other Party through check-points open for international passenger traffic.

ARTICLE 4
VISA FOR MEMBER OF DIPLOMATIC AND CONSULAR MISSIONS

1. Nationals of either Party who are holders of valid diplomatic, official, service, consular, and special passports and assigned as member of diplomatic or consular mission in the territory of the other Party, including their family members, shall be required to obtain appropriate entry visa from the Embassy of the other Party prior to their entry.

2. During the period of their assignment, the abovementioned persons who are holders of a stay permit and ID Card issued by the receiving Party may leave, remain and re-enter the territory of the other Party without Visa, as long as their stay permit and ID Card are still valid and presented at entry along with a valid diplomatic, official, service, consular, or special passports.

ARTICLE 5
VISA RESTRICTION

The holders of valid passport of either Party referred to this Agreement may enter into and depart from the territory of the other Party by any point authorized for that purpose by the competent immigration authorities, without any restriction except for those stipulated in the security, migratory, customs, sanitary, and other

regulations which may be legally applicable to holders of diplomatic, official, service, consular and special passports.

ARTICLE 6
RIGHT OF REFUSAL

Either Party reserves the right to refuse admission of entry or shorten the duration of stay of any person entitled to visa exemption and facilities under this Agreement if it considers that person undesirable.

ARTICLE 7
SPECIMEN OF PASSPORT

The Parties shall exchange, through diplomatic channels, specimens of their passports being used by each Party thirty (30) days before the entry into force of this Agreement as well as specimens of any new passports before their introduction.

ARTICLE 8
SUSPENSION

1. Each Party may, at any time, temporarily suspend all or part of this Agreement for reasons of national security, public order or public health.

2. The introduction as well as termination of the measures stated in Paragraph 1 of this Article shall be duly informed to the other Party thirty (30) days in advance through diplomatic channels.

ARTICLE 9
SETTLEMENT OF DISPUTES

Any disputes between the Parties on the interpretation or implementation of this Agreement shall be settled amicably through consultations or negotiations between the Parties.

ARTICLE 10
AMENDMENT

Either Party may request in writing an amendment of all or part of this Agreement. The adoption of amendment shall be done by common agreement

between the Parties, and shall enter into force as indicated in Article 11 of this Agreement.

ARTICLE 11
ENTRY INTO FORCE, DURATION, AND TERMINATION

1. This Agreement shall enter into force thirty (30) days from the date of the receipt of the last written notification in which the Parties inform each other, through diplomatic channels, that all requirements for the entry into force of this Agreement, as stipulated under their respective national legislation, have been fulfilled.

2. This Agreement shall remain in force for an indefinite period of time, unless either Party decides to terminate this Agreement by giving written notice to the other Party through diplomatic channels ninety (90) days prior to the expected termination date.

IN WITNESS WHEREOF, the undersigned being duly authorized by their respective Governments have signed this Agreement.

DONE in Panama City on this fifth (5th) day of June, in the year two thousand and fifteen (2015), in duplicate, in the Indonesian, Spanish, and English languages, all texts being equally authentic. In case of any differences of interpretation the English text shall prevail.

FOR THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA

DIAN TRIANSYAH DJANI

Director General For America and Europe

FOR THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF PANAMA

LUIS MIGUEL HINCAPIÉ

Vice Minister of Foreign Affairs